

BAB I

PENDAHULUAN

Global warming merupakan isu yang beberapa tahun belakangan ini marak dibicarakan. Mengingat dampak yang ditimbulkan dari global warming itu tidak hanya berdampak pada satu pihak saja, akan tetapi masalah global warming sangatlah kompleks. Global warming sangatlah mempengaruhi berbagai segi kehidupan baik kehidupan politik, ekonomi, perdagangan, pariwisata, maupun sosial dan budaya.

Indonesia sebagai negara berkembang dan merupakan negara kepulauan tentu harus melindungi pulau-pulaunya dari ancaman pemanasan global yang mengakibatkan naiknya permukaan air laut. Pemanasan global kini menjadi isu yang paling sering dibicarakan oleh pemerintah Indonesia dalam forum-forum internasional salah satunya adalah *United Nations Framework on Climate Change* (UNFCCC).

A. Alasan Pemilihan Judul

Penyelenggaraan *United Nations Framework on Climate Change* (UNFCCC) di Kopenhagen bisa dikatakan sebagai alat atau sarana Indonesia untuk ikut serta dalam isu perubahan iklim atau climate change. Dengan diselenggarakannya *United Framework on Climate Change* (UNFCCC) di Kopenhagen diharapkan dunia tidak akan menganggap remeh negara Indonesia. Meskipun Indonesia termasuk dalam negara berkembang akan tetapi

Indonesia pernah menorehkan sejarah menjadi tuan rumah dalam *United*

Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Bali pada tahun 2007. Dengan begitu dunia akan tahu bahwa Indonesia yang negara berkembang saja, sangat perhatian atau concern terhadap lingkungan khususnya pada perubahan iklim. Dimana dewasa ini perubahan iklim menjadi isu yang sangat kompleks yang beredar di masyarakat internasional dan berdampak besar sekali bagi kelangsungan hidup seluruh makhluk di dunia.

Gas rumah kaca sendiri merupakan hasil kegiatan manusia terkait penggunaan bahan bakar fosil (minyak bumi dan batu bara), seperti pada alat transportasi dan kegiatan lain yang berhubungan dengan hutan, pertanian dan peternakan. Gas rumah kaca juga muncul dalam penggunaan peralatan elektronik dan penggundulan hutan serta kebakaran hutan yang mengurangi penyerapan karbon dioksida (CO₂) yang merupakan salah satu unsur penting dari gas rumah kaca.¹

Dengan diselenggarakannya *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)* di Kopenhagen Denmark, diharapkan sebagai sarana untuk memperlihatkan potensi dan peran Indonesia di mata internasional secara keseluruhan terutama dalam perhatiannya terhadap perubahan iklim. Sehingga tema "**Peran Indonesia Dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) COP Ke-15 di Kopenhagen 2009***". Ini masih tergolong baru dan menarik untuk dikaji, khususnya pada isu perubahan iklim dalam dinamika Hubungan internasional, belum adanya yang mengangkat tema skripsi tentang Peran Indonesia dalam

¹ Majalah garasi edisi November 2007, dunia berubah iklim berubah hal. 25

perubahan iklim dan mudah-mudahan tema yang diangkat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah wawasan serta pengetahuan bagi khalayak yang membutuhkan hal-hal tentang khasanah Hubungan Internasional.

B. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa penjelasan yang hendak dicapai oleh penulis, antara lain:

1. Memberi rumusan masalah yang relevan untuk mencari jawaban dan penjelasan yang disusun dalam perumusan masalah, Hipotesa dibuktikan dengan data dan fakta serta sebagai manifestasi penerapan teori-teori yang pernah penulis dapat selama di bangku kuliah.
2. Memberikan gambaran Peran Indonesia Dalam *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Kopenhagen 2009.
3. Secara khusus, penulisan ini diajukan untuk melengkapi salah satu syarat bagi penulis dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan strata-1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

C. Latar Belakang Masalah

Isu perubahan iklim saat ini sedang menjadi isu global terutama dua dekade terakhir ini sehingga baik pemerintah maupun masyarakat di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang telah memberikan perhatian yang serius pada masalah tersebut. Isu perubahan iklim dihembuskan oleh negara-negara maju kepada negara sedang berkembang ditujukan bukan saja untuk demi kelangsungan hidup bersama, tetapi yang lebih penting lagi yaitu demi kenyamanan hidup masyarakat di negara-negara maju.

Berkembangnya isu perubahan iklim menjadi suatu isu global membawa dampak positif dan negatif pada kebijakan politik di masing-masing negara terlebih lagi di negara berkembang. Dari segi positif akan membawa dampak pada proses demokratisasi politik, dimana peran-peran dari lembaga swadaya masyarakat sebagai salah satu aktor dalam proses pengambilan keputusan politik sangat terlihat jelas. Tapi dari segi negatifnya, hal ini berdampak pada adanya perbedaan kepentingan didalam masing-masing aktor lembaga-lembaga pemerintahan, pengusaha dan masyarakat sehingga sering kali menimbulkan perebutan kepentingan antar aktor yang berperan.

Sejak mengikuti Konferensi PBB di Stockholm 1972, Indonesia merasa perlu menindaklanjuti hasil konferensi tersebut dengan menitikberatkan pada pembentukan dan perumusan kebijakan konkrit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pengawasan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Setelah 20 tahun pertemuan Stockholm dilanjutkan dengan KTT

Bumi tahun 1992 dimana isu lingkungan hidup berkembang lebih kompleks

lagi yaitu dari persoalan keterbatasan sumber alam ke masalah pembuangan sampah dan limbah industri. Partisipasi Indonesia tidak sampai disitu saja, dalam mewujudkan usaha yang lebih konkrit lagi, Indonesia sebagai salah satu negara yang mengalami permasalahan di bidang lingkungan hidup juga berperan penting dalam mewujudkan usaha tersebut.

Dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan dan pembangunan yang lebih dikenal dengan KTT Bumi di Rio De Janeiro, Brazil, pada 1992, para pemimpin pemerintahan sedunia menyetujui dokumen *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC).² KTT bumi di Rio de Janeiro ini merupakan konvensi mengenai perubahan iklim dan bertujuan untuk menjaga stabilitas konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer pada tingkat yang aman untuk kehidupan dunia. COP/ MOP UNFCCC, merupakan konferensi tingkat tertinggi untuk pengambilan keputusan terkait isu perubahan iklim. Indonesia yang merupakan salah satu peserta dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro delegasinya dipimpin oleh Presiden Soeharto juga ikut menandatangani konvensi ini. Dan sejak itu Indonesia aktif serta menyelamatkan bumi dari ancaman dampak perubahan iklim³. Konferensi ini adalah sebuah upaya untuk merespon perubahan iklim yang berhubungan dengan pembangunan.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) kemudian digerakkan pada 21 Maret 1994 dan kini sudah memiliki 186

² www.walhi.or.id (Selasa, 08 Desember 200) 9COP 15 Copenhagen : 40 Negara-Negara Annex I, Konvensi Perubahan Iklim 1994 dan Apa Itu COP

³ Prof. Dr. Emil Salim, *Menanggapi Perubahan Iklim*, Jendela Edisi 10, 2007

partisipan dari berbagai negara.⁴ Keterlibatan aktif Indonesia dalam pelaksanaan *Conference of Parties* (COP) dimulai dari pelaksanaan COP 1 hingga COP 13. Bahkan dalam COP 3 bulan desember 1997 di Kyoto, Jepang, Indonesia juga menjadi salah satu anggota negara berkembang yang meratifikasi Protokol Kyoto. Dimana Protokol Kyoto merupakan kesepakatan emas yang mengikat bagi negara-negara dalam menanggulangi perubahan iklim yang terjadi diantaranya dengan cara menurunkan beberapa persen emisi karbon di negara sesuai dengan ketentuan yang disepakati bersama. Tentu hal tersebut menjadi hal yang sangat penting sekali untuk dilakukan Indonesia.

Pada COP-3 yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang pada Desember 1997. Negara partisipan setuju untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Enam gas yang harus dikurangi adalah karbondioksida, metana, nitrus oksida, sulphur, heksafluorida dan klorofluorokarbon.

Tahun 2007 merupakan tahun yang bersejarah bagi Indonesia karena berhasil menjadi tuan rumah dalam konferensi tingkat tertinggi dalam pengambilan keputusan terkait isu perubahan iklim. Sebagai tuan rumah tentu Indonesia memiliki tujuan-tujuan dalam konferensi ini yakni: Pertama, tercapainya kesepakatan untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca dan membantu negara berkembang dalam pemberian insentif, termasuk untuk penghutanan kembali dan pencegahan deforestasi. Kedua, dilaksanakan melalui program adaptasi, mitigasi, alih teknologi, dan pendanaan iklim.

bidang pembangunan berkelanjutan melalui mekanisme pembangunan bersih (CDM).

Sedangkan manfaat dari Konferensi Perubahan Iklim ini, Pertama menggalang kesepakatan antara bangsa untuk mengurangi potensi emisi gas rumah kaca di dunia (mendorong perluasan perdagangan emisi antar Negara kaya dan Negara berkembang). Kedua, meningkatkan komitmen dan program nasional serta internasional untuk memperkuat pembangunan masa depan Indonesia. Ketiga, sebagai negara kepulauan dan mega biodiversity untuk dapat mengatasi masalah perubahan iklim. Keempat, Indonesia akan mendapatkan devisa dari 10.000 peserta ditambah potensi keluarga/ pedamping (akomodasi, transportasi dan wisata).

Indonesia bersama negara-negara berkembang lainnya akan berjuang untuk mendapatkan keadilan dalam mengantisipasi perubahan iklim dengan mengedepankan prinsip *common but differentiated responsibilities*. Indonesia berkepentingan untuk mewujudkan *Bali Action Plan*, yang merupakan hasil Konferensi Perubahan Iklim di Bali tahun 2007, untuk disepakati di Kopenhagen. Acuan utama the Bali Roadmap ini adalah keputusan pada COP13 / CMP3 yang disebut *the Bali Action Plan*. *The Bali Action Plan* adalah sebuah proses untuk menyepakati sebuah perjanjian internasional pasca 2012, pada saat perioda pertama Protokol Kyoto Berakhir.⁵ Indonesia menegaskan mandat BAP, yang menempatkan *shared vision* sebagai arah Aksi Kerjasama Jangka Panjang yang mewakili ketertarikan dalam upaya stabilisasi

konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer dengan memperhatikan semua pilar BAP yaitu: mitigasi (termasuk target jangka panjang penurunan emisi dunia secara global), adaptasi, pendanaan dan alih teknologi. Negara maju harus tetap memimpin upaya mitigasi sedangkan negara berkembang akan berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui upaya pembangunan ekonomi rendah karbon di masing-masing negara.

Bagi Indonesia, ada beberapa hal prioritas yang akan diperjuangkan, yaitu kesepakatan target penurunan emisi sebagai kelanjutan Protokol Kyoto sesuai Bali Action Plan, yaitu 40% rata-rata penurunan emisi oleh negara maju. Kemudian, disepakatinya mekanisme REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) agar segera memasuki tahapan implementasi, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memasukkan isu kelautan menjadi isu sentral dalam perubahan iklim sebagaimana yang tertuang dalam Manado Ocean Declaration”⁶

Disisi lain permasalahan kerusakan hutan di Indonesia sudah merupakan suatu permasalahan yang besar, bahkan sudah mencapai ambang mengkhawatirkan. Salah satu penyebab kerusakan hutan di Indonesia adalah maraknya penebangan kayu liar (*illegal logging*). Saat ini diperkirakan kerusakan dan penggundulan hutan akibat penebangan kayu liar (*illegal logging*) sudah mencapai dua puluh juta hektare⁷. Laporan Green peace menyebutkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia adalah kerusakan hutan

⁶ Nias Online, *Konferensi Perubahan Iklim PBB dimulai Hari ini di Copenhagen*. Posted by Sunday, February 2010

⁷ <http://fontteologi.com/blog/2007/05/27/kerusakan-hutan-di-indonesia/>

tertinggi di dunia. Data Forest Watch Indonesia tahun 2003 menjelaskan bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia saat ini telah mencapai 2,4 juta hektare pertahun. Kerusakan hutan (deforestasi) masih tetap menjadi ancaman di Indonesia. Menurut data laju deforestasi (kerusakan hutan) periode 2003-2006 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, laju deforestasi di Indonesia mencapai 1,17 juta hektar pertahun.

Bahkan kalau menilik data yang dikeluarkan oleh *State of the World's Forests 2007* yang dikeluarkan *The UN Food & Agriculture Organization* (FAO), angka deforestasi Indonesia pada periode 2000-2005 1,8 juta hektar/tahun. Laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat *Guinness Book of The Record* memberikan 'gelar kehormatan' bagi Indonesia sebagai negara dengan daya rusak hutan tercepat di dunia⁸. Dari total luas hutan di Indonesia yang mencapai 180 juta hektar sebanyak 21 persen atau setara dengan 26 juta hektar telah dijarah total sehingga tidak memiliki tegakan pohon lagi. Artinya, 26 juta hektar hutan di Indonesia telah musnah. Selain itu, 25 persen lainnya atau setara dengan 48 juta hektar juga mengalami deforestasi dan dalam kondisi rusak akibat bekas area HPH (hak penguasaan hutan). Dari total luas hutan di Indonesia hanya sekitar 23 persen atau setara dengan 43 juta hektar saja yang masih terbebas dari deforestasi (kerusakan hutan) sehingga masih terjaga dan berupa hutan primer.⁹

Tidak hanya kondisi hutan Indonesia saja yang mengalami kerusakan, namun kondisi laut Indonesia terutama terumbu karangnya pun mengalami

⁸ Kerusakan hutan indonesia Deforestasi Indonesia Alamendah Blog.htm

⁹ The United Nations World Agency Report on the Status of the World's Forests

kerusakan yang hampir sama. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki lebih kurang 17.508 pulau, dengan sekitar 6.000 di antaranya merupakan pulau yang berpenduduk. Indonesia secara keseluruhan juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni 81.000 km yang merupakan 14% dari garis pantai yang ada di seluruh dunia. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km², atau mendekati 70% dari luas keseluruhan negara Indonesia.¹⁰ Namun sekarang ini laut Indonesia semakin lama semakin memprihatinkan keadaannya. Berbagai kerusakan laut makin banyak ditemukan. Terdapat terumbu karang yang rusak di berbagai daerah akibat pengambilan ikan dengan menggunakan pukat harimau atau bom, atau karena pembukaan tambak udang dan lainnya. Pencemaran laut pun terjadi. Limbah industri dan rumah tangga, khususnya limbah pabrik (tailing), rata-rata bermuara ke laut. Seperti yang terjadi di dua teluk di Maluku Utara yakni Teluk Kao di Kabupaten Halmahera Utara dan Teluk Buli di Kabupaten Halmahera Timur atau kasus yang terkenal yaitu pencemaran tailing di Teluk Buyat, Sulawesi.

Indonesia merupakan negara yang mempunyai potensi terumbu karang terbesar di dunia luas terumbu karang di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 60.000 km². Hal tersebut membuat Indonesia menjadi negara pengekspor terumbu karang pertama di dunia. Dewasa ini, kerusakan terumbu karang, terutama di Indonesia meningkat secara pesat. Terumbu karang yang masih berkondisi baik hanya sekitar 6,2%. Kerusakan ini menyebabkan

¹⁰ <http://www.terangi.or.id/id/kerusakan-laut-indonesia/index.php?2.htm>

· meluasnya tekanan pada ekosistem terumbu karang alami. Meskipun faktanya kuantitas perdagangan terumbu karang telah dibatasi oleh *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES), laju eksploitasi terumbu karang masih tinggi karena buruknya sistem penanganannya. Sebanyak 22% terumbu karang di wilayah Indonesia Bagian Timur dan Papua Nugini mengalami rusak. Angka ini lebih kecil dibandingkan kerusakan di wilayah Indonesia Bagian Barat sebesar 71%.¹¹

Tahun 2008, COP 14 UNFCCC di dilaksanakan di Poznan Polandia, *Climate Justice Now* mencatat sedikitnya 1.500 pelobi industri baik datang sebagai lembaga Swadaya masyarakat ataupun delegasi resmi pemerintah. Anggota delegasi Brazil, adalah pelobi perusahaan minyak Shell, UNICA, Grupo Plantar. Para pelobi industri juga terlihat di delegasi Itali dan Finlandia. Pada COP 14 di Poznan Polandia, telah memberikan kemewahan sistematis yang berlebih pada pelobi industri dibanding lembaga publik, kritik Koalisi *Climate Justice Now* “Sektor swasta memiliki pengaruh yang sangat besar dalam negosiasi iklim PBB. Hasil dari COP 14 poznan sesungguhnya belum mencerminkan kemajuan yang berarti dalam mencapai stabilisasi emisi GRK di atmosfer.

Pada tanggal 9-10 juli 2009, Indonesia diundang untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi G-8 plus di L'aquila, Italia.¹² Konferensi tingkat tinggi G-8 plus di L'aquila merupakan konferensi yang membahas mengenai *Major Economics Forum* (MEF) yang terbagi dalam tiga sesi yakni:

¹¹ http://www.wartaekonomi.co.id/kerusakan_laut_indonesia/index.php.htm

¹² Melelah serasi edisi 05/2009, siter Negara main mengemukakan hal 5

Perdagangan, energy dan lingkungan hidup serta ketahanan pangan. Dalam KTT G-8 plus ini dihadiri setidaknya 28 negara termasuk Indonesia dan 11 organisasi internasional. Dalam negosiasi perubahan iklim selama ini, disepakati bahwa negara-negara industri wajib membantu negara-negara berkembang dalam mengatasi dampak perubahan iklim, tetapi faktanya negara-negara maju enggan mengucurkan dananya untuk transfer teknologi, pembangunan kapasitas serta fasilitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim iklim di negara-negara berkembang.

Indonesia yang merupakan negara berkembang dan salah satu dari negara -negara anggota UNFCCC yang sangat penting dalam meminimalisasi meningkatnya pemanasan global dan perubahan iklim. Sebab, Indonesia memiliki ribuan hektar hutan yang mampu menyerap CO₂ (karbondioksida) sebagai zat utama penyebab terjadinya *global warming and climate change*. Sebagai negara yang mempunyai peran signifikan sebagai *the defender of the earth*, Indonesia akan banyak diharapkan oleh negara -negara maju untuk melindungi hutannya.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut: **Ragamana Peran Indonesia Dalam Conference**

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar pemikiran pada prinsipnya bertujuan untuk membantu penulis menentukan tujuan dan arah penulisan, serta memilih teori konsep untuk menyusun hipotesa. Untuk membantu menjelaskan permasalahan diatas, penulis menggunakan dua teori yaitu:

1. Teori Peran
2. Diplomasi Lingkungan

Untuk dapat mengkaji penggunaan konsep dalam permasalahan ini, penulis menggunakan konsep yang pertama yaitu:

1. Teori Peran

Peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi. Setiap orang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.

Teori Peran menegaskan bahwa "*Perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan Peran politik*".¹³ Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan yang dipegang oleh seorang aktor politik.

Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kekuasaan tertentu. Sebenarnya, peran diambil dari dunia

teater, dalam teater seorang tokoh harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai aktor itu diharapkan berperilaku sesuai dengan kedudukan tokoh.¹⁴ Kemudian posisi aktor dianalogikan dengan posisi seseorang yang ada dalam masyarakat yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak dapat berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang yang berhubungan dengan orang atau aktor tertentu. Dalam teori peran, interaksi manusia dipandang sebagai serangkaian kesatuan yang lama.

Dalam teater, interaksi manusia ditentukan oleh scenario atau sutradara, aktor lain atau audience. Manford Khun menegaskan bahwa interaksi tergantung pada konteks strukturnya. Oleh Khun struktur tersebut merupakan kekuatan yang penting dalam hubungannya dengan struktur sosial, struktur tersebut ditentukan oleh status, norma, nilai dan kelompok. Ini merupakan faktor penting dari aksi manusia.

Pemain diatas panggung atau dalam teater harus mempunyai definisi bagian yang jelas untuk dimainkan, begitu juga aktor dalam masyarakat harus menempati posisi yang jelas, pemain harus mengikuti perintah sutradara sedangkan aktor dalam masyarakat harus menyesuaikan diri untuk memerintah masyarakat dengan kekuatan dan kepentingannya, sebagai anggota masyarakat harus

¹⁴ Mas'oed, Mohtar, *Studi Ilmu Hubungan Internasional, Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Pusat Antar Universitas Studi Sosial UGM, Yogyakarta, 1989, hal. 44.

mengatur respon satu sama lain kepada lainnya dan juga mengambil peran dari berbagai audience atau menyamaratakan orang lain. Harapan merupakan konsep dari teori peran. Ada tiga kelas dari harapan yang melambangkan visi dari teori peran yaitu:

- 1) Harapan dari scenario
- 2) Harapan dari pemain lain
- 3) Harapan dari audience

Menurut John Wahlke, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Kedua, teori Peran mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral.¹⁵ Dalam pandangan teoritis Peran, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan Peran. Model teori Peran langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori Peran menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi Peran, kita masih bisa membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti Peran. Dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang membentuk institusi. Dalam kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan

mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan. Perilaku aktor politik juga dipengaruhi oleh peran yang dimainkannya, atau posisinya dalam pemerintahan.

2. Diplomasi Lingkungan

Konsep Diplomasi Lingkungan ini berasal dari dua kata yaitu Diplomasi dan Lingkungan, berikut ini pengertian Diplomasi dan Lingkungan:

Secara garis besar menurut S. L Roy, Diplomasi adalah

“Diplomasi adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain. Definisi tersebut jika ditinjau dari konteks hubungan internasional tampaknya lebih mengena. Tetapi secara conventional, diplomasi diartikan sebagai salah satu usaha untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dikalangan masyarakat internasional.”¹⁶

Berdasarkan pengertian dari Undang-Undang Dasar No.23

Tahun 1997 menyatakan bahwa:

“lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”

Sedangkan menurut Harold dan Margareth Sprouts dalam Teori Lingkungan "*A Man Millieu Relationship*" mengatakan bahwa:

"Faktor lingkungan sangat mempengaruhi suatu masyarakat politik dalam menentukan kebijakan politiknya. Masyarakat politik memiliki basis geografis untuk menerangkan tingkah laku politik. Masing-masing masyarakat politik terletak pada suatu wilayah yang merupakan kombinasi unik dalam hal lokasi, ukuran, bentuk, iklim dan sumber-sumber alamnya. Disamping itu sebagian besar aktifitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber human dan non human."¹⁷

Menurut Andreas Pramudianto menjelaskan bahwa Diplomasi dan Lingkungan Hidup merupakan istilah yang dapat dikaitkan dan berkembang menjadi Diplomasi Lingkungan (*Environmental Diplomacy*) sehingga pengertiannya menjadi:

"Ilmu dan seni yang mempelajari dan menangani isu-isu lingkungan hidup untuk mencapai kesesuaian dengan kepentingan nasional (atau kepentingan dan kebijakan entitas bukan negara) terutama kebijakan politik luar negeri di bidang lingkungan hidup suatu negara."¹⁸

Sehingga diplomasi lingkungan dapat mencakup dari persoalan pencemaran udara, limbah B3, pencemaran laut, perdagangan satwa langka, perubahan iklim, bioteknologi, dan keamanan hayati hingga persoalan-persoalan seperti: nuklir, permukiman, pembangunan berkelanjutan, sumber daya air, energi dan lain-lain.

¹⁷ James E. Dougherty, Robert I. Pfaltzgraf, Jr *Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey*, Third Edition, Harper Collins Publisher, New York, 1990

¹⁸ Pramudianto, Andreas, *Diplomasi Lingkungan Hidup dan Ekst. III*, Dep. Lu. 2000, hal. 22

Merujuk pada kerangka teori Harold dan Margareth Sprouts tentang sebagian besar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak merata dari sumber-sumber *Human* dan *non Human*, dan faktor-faktor yang *Human* dan *non Human* itu dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia hanya dalam dua segi. Pertama, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil manusia hanya jika manusia memperhatikannya. Kedua, faktor-faktor itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan berdasarkan persepsi-persepsi tentang lingkungan.

Sebagai masyarakat politik tentunya Indonesia mempunyai wilayah geografis karena sebagian besar Indonesia dikelilingi oleh lautan, sebagai wilayah geografis tentunya ini akan mendukung Indonesia dalam menjalankan aktivitas kegiatan industri maupun ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan rakyatnya.

Dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya, Indonesia tentunya memanfaatkan faktor lingkungan *Human* sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan ekonomi maupun pembangunan. Sedangkan faktor lingkungan *non Human* seperti sumber daya alam baik migas maupun non migas dimanfaatkan sebagai kekayaan alam dan sumber penghasilan serta sarana pendukung dalam kegiatan ekonomi dan proses pembangunan negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Faktor faktor *Human* dan *non Human* menjadi faktor

faktor yang mempengaruhi keputusan Indonesia dalam memelihara dan menjaga alamnya.

F. Hipotesa

Berdasarkan latar belakang masalah dan didukung oleh kerangka pemikiran yang telah dikemukakan diatas, penulis menarik hipotesa bahwa Peran Indonesia Dalam *Conference of Parties* (COP) Ke-15 2009 adalah: Indonesia berperan aktif dengan memasukkan isu kehutanan dan kelautan sebagai isu sentral dalam COP 15 mengingat pemerintah Indonesia perlu melindungi sektor kehutanan dan kelautan, serta menjadikan *Copenhagen Accord* sebagai landasan bagi proses perundingan guna menghasilkan kerangka kerja perubahan iklim pasca-2012 yang mengikat secara hukum.

G. Jangkauan Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini menegaskan bagaimana Peran Indonesia dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) di Kopenhagen sebelum maupun sesudah UNFCCC di Kopenhagen. Hal ini dilakukan agar penelitian ini tidak menyimpang dari tema yang telah

H. Metode Pengumpulan data

Metode penelitian ini terdiri dari tiga bagian yaitu:

1. Teknik mencari data atau mengumpulkan data.

Semua bentuk penerimaan data yang dilakukan adalah dengan cara merekam kejadian, menghitungnya, mengukurnya dan mencatatnya. Dalam penelitian akan menggunakan system pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, data diperoleh dan disusun melalui buku, surat kabar, jurnal ilmiah dan Website.

2. Teknik analisa data.

Dalam penelitian ini kan menggunakan teknik analisa kualitatif. Analisa kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisa dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogy, komparasi dan sejenis itu.¹⁹

3. Teknik menarik kesimpulan.

Teknik menarik kesimpulan dengan cara induksi dan deduksi, kesimpulan penelitian harus juga dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan harus sinkron dengan problematika dan hipotesis.²⁰ Terhadap data yang bersifat kualitatif, maka pengolahannya dibandingkan dengan suatu standaratau kriteria yang telah dibuat oleh peneliti.²¹

¹⁹ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, Hal.95

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1998, Hal.354

²¹ Suharsimi Arikunto, *op.cit* Hal. 348

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab membahas hal yang berbeda-beda untuk memudahkan memahami skripsi ini.

Bab I merupakan penggambaran skripsi secara umum, yaitu mulai dari alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka dasar teori, hipotesa, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

Bab II membahas tentang Konvensi Kerangka Kerja PBB Tentang Perubahan Iklim, Perjalanan UNFCCC, Negara-negara anggota UNFCCC, Tujuan UNFCCC.

Bab III membahas tentang Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Isu Lingkungan Sebelum COP 15

Bab IV membahas peran-peran Indonesia dalam konferensi perubahan iklim UNFCCC Kopenhgen.

Bab V berisi kesimpulan yang akan menggambarkan kembali tentang